

**ANALISIS FAKTOR KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TENGAH**

Oleh:

Dimas Anugrah Dwi Saputra, Dra. Nina Widowati, M.Si

**Departemen Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos. 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

This research has a purpose to describe and to analyze both the performance result and the factors of success performance of Environmental Agency of Central Java using a qualitative method with descriptive type. The results showed that the performance of Environmental Agency of Central Java has done well. Nevertheless, there are some obstacles such as the limit of human resources and the change of Local Government Regulation. The success performance driven factors is seen from aspects there are personal factor, leadership factor, team factor, system factor, and constextual factor. The result of this research is the performance of Environmental Agency of Central Java has done well. The obstacles inside are the limit of human resources and the determining of Regulation number 23 in 2014. The success performance support factors are personal factor, leadership factor, team factor, and system factor. Based on the result, the author recommend to the Environmental Agency of Central Java to fix the performance of Environmental Agency of Cental Java to be better and optimum.

Keyword : *analysis performance, support factor, Environmental Agency of Cental Java*

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Manusia sejak dilahirkan di dunia ini telah berada pada suatu lingkungan hidup tertentu. Lingkungan hidup menjadi bagian mutlak yang tidak terlepas dari kehidupan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa lingkungan hidup tidak hanya menggambarkan apa yang ada disekitar kita namun juga menggambarkan perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan.

Keberadaan lingkungan saat ini sudah mengalami penurunan, banyak terjadi permasalahan-permasalahan lingkungan baik secara alami maupun dari perilaku manusia. Sifat alami manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, membuat lingkungan menjadi dampak dari sifat alami manusia. Berbagai permasalahan timbul terkait dengan lingkungan. Maka perlu ada sebuah organisasi yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan lingkungan.

Untuk menangani permasalahan lingkungan yang semakin kompleks dibentuklah Badan Lingkungan Hidup sebagai SKPD yang menangani permasalahan lingkungan. Di Jawa Tengah, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah terletak di Kota Semarang. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi

dan tugas pembantu di bidang lingkungan hidup.

Dalam mencapai penyelenggaraan kelestarian lingkungan hidup yang baik, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah merumuskan visi dan misi yang dijadikan sebagai tujuan penyelenggaraan organisasi ini. Visi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah yaitu “Menjadi Lembaga yang tanggap dan mampu mewujudkan lingkungan hidup yang lestari bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat”. Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam misi sebagai berikut.

1. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan mitigas dan adaptasi bencana, kelestarian ekosistem serta pengawasan dan penataan hukum bidang lingkungan;
2. Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan, aparatur yang profesionalm peraturan perundangan, system informasi dan pelayanan di bidang lingkungan hidup;
3. Meningkatkan kemitraan bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, ketrampilan dan kemandirian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kearifan lokal;

Dalam mencapai visi dan misi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, diperlukan kinerja organisasi yang baik. Pemerintah yang baik merupakan pemerintah yang responsive dalam upaya memecahkan beragam masalah dan harus mampu lebih proaktif dalam upaya memecahkan beragam masalah dan harus mampu lebih proaktif dalam menanggapi masalah. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah telah dapat memaksimalkan pencapaian program kegiatan yang telah direncanakan.

Tabel 1.1  
 Capaian Kinerja BLH Prov. Jateng Tahun 2015  
 Meningkatkan Upaya Pengendalian **Pencemaran**  
 dan **Kerusakan Lingkungan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2015	% Realisasi Target
Terinformasinya status mutu air sungai yang menjadi Standar Pelayanan Minimal	Persentase status mutu air yang diinformasikan	100 % (8 sungai)	100 % (8 sungai)	100
Tertanganinya kasus lingkungan akibat dugaan pencemaran/ perusakan lingkungan hidup	Persentase pengaduan akibat dugaan pencemaran/ perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100
Meningkatnya kinerja pengelolaan limbah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Industri Menengah Besar	Jumlah UMKM dan/ atau obyek domestic dan usaha/ atau kegiatan menengah/ besar yang diawasi dan ditangani pengelolaan limbahnya	15 UMKM. 170 usaha dan/ atau kegiatan	18 UMKM, 243 usaha dan/ atau kegiatan	120
Mengkatnya kebersihan dan keteduhan di daerah perkotaan di Jawa Tengah	Jumlah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah yang memperoleh ADIPURA	14 Kabupaten/ Kota	17 Kabupaten/ Kota	121
Meningkatnya kualitas dokumen AMDAL/ UKL-UPL	Jumlah rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL)-Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah dilaksanakan	10 usaha/ kegiatan	40 usaha/ kegiatan	400
Meningkatnya kualitas pengelolaan limbah B3 oleh pelaku usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pembinaan perbaikan kinerja pengelolaan B3 dan limbah B3 pada pelaku usaha dan/ usaha kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	75 pelaku usaha/ kegiatan	120 pelaku usaha/ kegiatan	160
Terinfomasinya status mutu udara ambient 35 Kab/Kota di Jawa Tengah	Persentase status mutu udara ambient Kabupaten/ Kota yang diinformasikan	100 % (35 Kabupaten/ Kota)	100% (35 Kabupaten/ Kota)	100

Berdasarkan dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 telah berhasil melaksanakan program kerja dalam meningkatkan upaya pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup. Keberhasilan ini ditandai dengan capaian kinerja yang

mencapai 100% dan bahkan beberapa indikator kinerja melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian melebihi 100%. Hal ini membuktikan bahwa kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang lingkungan hidup.

Tabel 1.2  
 Capaian Kinerja BLH Prov. Jateng Tahun 2015  
 Meningkatkan Upaya Pengendalian **Kerusakan Lingkungan**  
 dan **Pelestarian Ekosistem Melalui Konservasi**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2015	% Realisasi Target
Meningkatnya penanganan kerusakan di wilayah persisir	1) Jumlah tanaman/ luasan penghijauan pantai	1) 510.000 batang	570.664 batang	112
	2) Bangunan pencegah abrasi/erosi/ sabuk pantai	2) 535 meter	-----	-----
Meningkatnya penanganan lahan kritis kawasan lindung di luar kawasan hutan	1) Jumlah tanaman konservasi	1) 113.000 batang	105.936 batang	101,3
	2) Jenis tanaman local unggulan/ langka	2) 40 jenis tanaman langka	50 jenis tanaman langka	125
	3) Jumlah bangunan sipil teknis	3) 40 bangunan sipil teknis	10 unit bangunan sipil teknis	25
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan	40 Ha	77,01 Ha	193

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan program kerja di tahun 2015. Beberapa program kerja telah terlaksana sesuai dengan target, namun beberapa program kerja belum berhasil telaksana dan tidak sesuai dengan target. Belum terlaksana dan sesuai dari target ini

dikarenakan adanya perubahan regulasi, sehingga kewenangan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dalam mengerjakan bangunan fisik dilimpahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu, program kerja berhasil dicapai sesuai dengan target.

Tabel 1.3  
 Capaian Kinerja BLH Prov. Jateng Tahun 2015  
 Meningkatkan Penyediaan dan Penyebarluasan  
 Infomasi Lingkungan bagi Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2015	% Realisasi Target
Meningkatnya penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan bagi masyarakat	Tersedianya informasi lingkungan hidup Jawa Tengah	- 120 SLHD - 200 eksemplar bulletin warta lingkungan - 100 eksemplar jurnal lingkungan	Tercetaknya Dokumen Statistik Lingkungan, Status Lingkungan Hidup Daerah dan Informasi lingkungan melalui media cetak dan elektronik	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan program kerja di tahun 2015 dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

serta mencapai visi dan misi. Dalam pelaksanaan peningkatan penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan bagi masyarakat tidak ditemukan kendala atau hambatan sehingga program kerja dapat terlaksana dengan baik.

Tabel 1.4  
Capaian Kinerja BLH Prov. Jateng Tahun 2015  
Meningkatkan Kemitraan Bersama Masyarakat dan Pemangku  
Kepentingan Lainnya, Ketrampilan dan Kemandirian

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2015	% Realisasi Target
Mingkatnya kapasitas dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah sekolah di 35 Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah yang mendapat penghargaan ADIWIYATA	95 sekolah	149	156,84

Sumber: LKJIP Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan indikator kinerja jumlah sekolah di 35 Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah yang mendapat penghargaan ADIWIYATA capaian kinerjanya 156,84 %, hal ini dapat dikatakan amat baik, bahkan melebihi dari target kinerja yang telah ditetapkan. Jumlah sekolah yang meraih penghargaan ADIWIYATA merupakan satu indikator *outcome* yang grafiknya setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan kesadaran sekolah di Jawa Tengah semakin meningkat untuk menjadi sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan sehingga dapat meraih penghargaan tersebut.

Berdasarkan deskripsi diatas, penulis mengasumsikan adanya faktor keberhasilan capaian kinerja di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Tengah adalah kerjasama tim yang baik. Dalam pelaksanaan setiap program kegiatan di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh sebuah tim yang

telah dibentuk berdasarkan rekomendasi pimpinan. Kerjasama tim bermula dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Hal ini menurut penulis menjadi faktor keberhasilan capaian kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Berasumsikan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk menggali penelitian dengan judul tentang “Analisis Faktor Keberhasilan Capaian Kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah”.

## B. TUJUAN

1. Mendiskripsikan dan menganalisis hasil capaian kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis faktor keberhasilan capaian kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.

## C. TEORI

### C.1 ADMINISTRASI PUBLIK

Chandler & Plano dalam Keban (2004:3) mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Nicholas Henry dalam Pasolong (2007:5), mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

### C.2 PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK

Nicholas Henry dalam Keban (2008:4) mengungkapkan bahwa ada lima paradigma dalam administrasi negara atau publik, yaitu :

1. **Paradigma pertama (1900-1926) Dikotomi Politik dan Administrasi,** Goodnow dalam tulisannya yang berjudul "Politics and Administration" pada tahun 1900 mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedangkan administrasi memberi perhatiannya pada pelaksanaan atau implementasi

dari kebijakan atau kehendak tersebut.

2. **Paradigma kedua (1927-1937) Prinsip-Prinsip Administrasi,** Prinsip-prinsip yang tertuang dalam apa yang disebut sebagai POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*) yang penerapannya dapat diterapkan dimana saja, atau bahkan bersifat universal. Sedang lokus dari administrasi publik tidak pernah diungkapkan secara jelas karena mereka beranggapan bahwa prinsip – prinsip tersebut dapat berlaku dimana saja termasuk di organisasi pemerintah.
3. **Paradigma ketiga (1950-1970) Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik,** pada paradigma ini lokusnya adalah birokrasi pemerintah, sedang fokusnya menjadi kabur karena prinsip-prinsip administrasi publik mengandung banyak kelemahan.
4. **Paradigma keempat (1956-1970) Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi,** dalam paradigma ini prinsip-prinsip manajemen pernah populer sebelumnya, dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis system, riset operasi dsb., merupakan fokus dari paradigma ini. Semua fokus yang dikembangkan disini diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia bisnis tetapi juga dalam dunia administrasi publik karena itu lokusnya menjadi tidak jelas.
5. **Paradigma kelima (1970-1990) Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik,** paradigma ini telah memiliki fokus dan lokus yang

jelas. Fokus administrasi publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik.

### **C.3 MANAJEMEN PUBLIK**

Overman, dalam Pasolong (2008: 33) menyatakan bahwa manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing* dan *controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain. Berdasarkan pengertian para ahli dapat disimpulkan bahwa manajemen publik merupakan proses manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi publik.

### **C.4 KINERJA**

Armstrong dan Baron dalam Wibowo (2007:7) mengartikan kinerja sebagai hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian, kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja menurut Murphy dalam Sudarmanto (2009:8) memberikan pandangannya mengenai kinerja yang lebih merujuk pada perilaku bahwa kinerja merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja.

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau

program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Terkait konsep kinerja Rummler dan Brache dalam Sudarmanto (2009:7) mengemukakan ada 3 (tiga) level kinerja, yaitu :

1. Kinerja organisasi, merupakan pencapaian hasil (*outcome*) pada level unit analisis organisasi. Kinerja pada level organisasi ini terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi.
2. Kinerja proses, merupakan kinerja pada proses tahap-tahap dalam menghasilkan produk/layanan. Kinerja pada level proses ini dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses.
3. Kinerja individu/pekerjaan, merupakan pencapaian atau efektifitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Kinerja pada level ini dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu.

### **C.5 KINERJA ORGANISASI**

Pendapat ahli lainnya, Wibawa dan Atmosudirdjo dalam Harbani (2011:176) mengemukakan kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk meningkatkan kebutuhannya secara efektif. Kinerja merupakan konsep yang digunakan organisasi untuk menilai

hasil dicapai untuk mencapai tujuan organisasi.

Dimensi atau indikator kinerja merupakan aspek-aspek yang menjadi ukuran dalam menilai kinerja. Ukuran-ukuran dijadikan tolak ukur dalam menilai kinerja. Dimensi ataupun ukuran kerja sangat diperlukan karena akan bermanfaat baik bagi banyak pihak. Agus Dwiyanto (2006 : 50) mengukur kinerja birokrasi publik berdasar adanya indikator yang secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :

a. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dengan *output*. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

b. Kualitas Layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.

c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada

keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misinya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

d. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi

publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi sesungguhnya memberikan informasi mengenai prestasi pelaksanaan dari unit-unit organisasi, dimana organisasi memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas seluruh aktivitas sesuai dengan tujuan organisasi. Pendapat lain mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, antara lain dikemukakan oleh Armstrong dan Baron dalam Wibowo (2007:100), yaitu sebagai berikut :

1. *Personal factor*, ditunjukkan oleh tingkat keterampilan kompetensi yang dimiliki, motivasi, dan komitmen individu.
2. *Leadership factor*, ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan dukungan yang dilakukan oleh manajer dan team leader.
3. *Team factor*, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan sekerja.
4. *System factor*, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan organisasi.
5. *Contextual/situational factor*, ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.

#### **D. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Untuk mendapatkan

narasumber teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sistem snowball sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi.

#### **E. PEMBAHASAN**

Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, maka penulis melakukan penelitian terhadap kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Analisis kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dapat diketahui dengan melihat dimensi-dimensi pada kinerja organisasi. Dimensi-dimensi kinerja tersebut meliputi produktivitas, kualitas layanan, reponsivitas, responsibilitas, akuntabilitas. Berikut ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan.

1. Produktivitas, berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan tanggungjawab dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan hasil capaian kinerja indikator 100%, namun masih terdapat indikator yang belum mencapai target. Indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan terkendala dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sehingga membuat sasaran kinerja dalam beberapa kegiatan terhambat atau tidak dapat terlaksana. Selain itu juga terkadang terjadi kendala teknis di lapangan yang tidak diprediksi sebelumnya. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah belum memiliki upaya strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi. Perlunya upaya strategis dalam

mengoptimalkan kinerja di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah karena setiap tahun tentu akan memiliki tantangan yang terus berubah. Tantangan ini perlu diatasi dengan mengoptimalkan kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah sehingga perlunya upaya strategis kinerja untuk mengatasi tantangan tersebut.

2. Kualitas Layanan, bentuk pelayanan yang diberikan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah yaitu dibidang pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan penegakan hukum. Selain itu juga, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah memiliki Unit Pelaksana Tugas yaitu Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup (BP2LH) yang memberikan pelayanan berupa penambihan dan pengujian contoh air limbah, air permukaan, air bersih atau sumur, pengambilan dan pengujian contoh udara ambient, pm 10, pm 2,5, pengukuran emisi sumber bergerak, pengukuran emisi sumber tidak bergerak, pengukuran intensitas kebisingan, dan pengukuran tingkat getaran. Dalam pelaksanaan pemberian pelayan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan juga Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup (BP2LH) memiliki permasalahan yang membuat kinerja terhambat. Permasalahan dalam pemberian pelayanan yaitu kurangnya sumber daya manusia. Hal ini disebabkan karena adanya monatorium penerimaan pegawai negeri sipil yang merupakan kebijakan Presiden. Untuk mengatasi hal tersebut, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah menerima pegawai honorer. Kebijakan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk mengurangi beban kerja pegawai serta memaksimalkan anggaran

yang dimiliki sehingga pencapaian target yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

3. Responsivitas, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dalam menggali kebutuhan masyarakat melakukan kegiatan secara normatif yaitu melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrenbang), baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten atau kota dan ditingkat provinsi. Selain melalui musrenbang juga melalui rapat koordinasi dengan pemkab/kota dan SKPD terkait. Berdasarkan penjelasan narasumber segala bentuk aspirasi ditampung terlebih dahulu oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, kemudian akan dirapatkan untuk ditentukan prioritas aspirasi yang masuk. Sikap yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dalam menanggapi aspirasi masyarakat selalu terbuka.
4. Responsibilitas, pelaksanaan program kegiatan yang ada di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah menjadi ukuran tingkat efektivitas. Diketahui bahwa pelaksanaan program Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan dengan baik. Dalam setiap rangkaian kegiatan memiliki landasan peraturan perundang-undangan dan juga surat keputusan. Hal ini menjadi acuan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan setiap kegiatan baik pelaksanaan program maupun dalam memberikan pelayanan, sehingga Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan prinsip-prinsip administrasi yaitu berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada.
5. Akuntabilitas, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah melakukan pertanggungjawaban kepada stakeholder dalam hal ini adalah Gubernur Jawa

Tengah dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dibuat setahun sekali. Laporan ini berisi kegiatan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dalam waktu satu tahun dan juga penggunaan anggaran. Dalam upaya Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah melakukan transparansi kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga diunggah melalui website Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dilakukan agar masyarakat juga dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah setiap satu tahun sekali.

Untuk mengetahui faktor pendorong keberhasilan capaian kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, penulis melakukan penelitian dan mendapatkan hasil sebagai berikut :

1. Faktor personal, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, kondisi sumber daya manusia di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah sedang mengalami kekurangan sumber daya manusia. Untuk mengatasi hal ini, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah menerima pegawai honorer untuk mengurai beban kerja pegawai sehingga pencapaian berbagai kerja dan pemberian pelayanan dapat dilakukan dengan maksimal. Kondisi sumber daya manusia yang kurang, namun dinilai dari kualitas menurut hasil wawancara penulis dengan narasumber dapat dikatakan baik atau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam melaksanakan setiap program kegiatan, tentunya pegawai harus memiliki komitmen yang tinggi agar setiap pelaksanaan program dapat dilaksanakan dengan maksimal. Komitmen yang tinggi juga dimiliki sumber daya manusia di Badan

Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.

2. Faktor kepemimpinan, diketahui pemimpin sering memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada pegawainya dalam setiap kesempatan. Selain itu, cara pemimpin dalam mengambil keputusan bergantung terhadap situasi yang ada. Apabila pemimpin memang membutuhkan masukan-masukan dari pegawai maka pemimpin akan melakukan hal tersebut. Pemimpin sebagai top manajemen juga dapat mengambil keputusan sendiri, hal ini dilakukan apabila pemimpin memang tidak memerlukan masukan dari pegawai.
3. Faktor tim, berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa antar pegawai diwajibkan mendukung satu sama lain. Tujuannya agar kinerja bisa dilaksanakan dengan maksimal. Selain dukungan antar pegawai, salah satu indikator capaian kinerja yang baik yaitu adanya koordinasi yang baik. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah berusaha memaksimalkan koordinasi yang baik demi mencapai tujuan yang diharapkan.
4. Faktor sistem, diketahui bahwa Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah memiliki tata tertib yang diberlakukan untuk semua anggota organisasi. Adanya tata tertib ini agar anggota organisasi dengan disiplin dalam bekerja serta dapat menjadi faktor pendukung capaian kinerja yang optimal. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, tentunya organisasi memberikan fasilitas yang memadai guna memaksimalkan kinerja. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah memberikan fasilitas yang cukup memadai untuk memperlancar kinerja pegawainya.
5. Faktor kontekstual, diketahui bahwa Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah tidak begitu terpengaruh terhadap

perubahan dan tekanan di lingkungan eksternal maupun internal. Perubahan lingkungan eksternal dan internal tidak mempengaruhi kinerja. Selain perubahan lingkungan eksternal dan internal, tekanan dari eksternal dan internal juga tidak begitu mempengaruhi kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah artinya apapun yang terjadi disekeliling Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah tidak dijadikan beban oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.

## F. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Analisis Faktor Keberhasilan Capaian Kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah sudah dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari analisis kinerja dan faktor pendukung dibawah ini:

### A. Analisis Kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

1. Produktivitas, dilihat dari dimensi ini Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dapat dinilai kurang baik. Masih terdapat kendala yang perlu dibenahi oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah seperti perlunya menyelaraskan program kerja dengan regulasi yang berlaku, selain itu perlu adanya upaya strategis untuk memaksimalkan kinerja. Namun demikian, untuk capaian kinerja telah tercapai sesuai dengan target bahkan beberapa indikator kinerja melebihi target.
2. Kualitas layanan, dilihat dari dimensi ini Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah telah mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Kendala yang masih belum bisa

teratasi adalah masih kurangnya sumber daya manusia.

3. Responsivitas, dilihat dari dimensi ini Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dapat dinilai baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya agenda atau kegiatan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dalam menggali kebutuhan masyarakat yaitu melalui kegiatan musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrembang). Selain itu, sikap terbuka Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah terhadap setiap aspirasi, masukan maupun kritikan dari masyarakat.
  4. Responsibilitas, dilihat dari dimensi ini Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dapat dinilai baik. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat efektivitas capaian kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan juga dalam melaksanakan setiap program kegiatan didasarkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta surat keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.
  5. Akuntabilitas, dilihat dari dimensi ini Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dapat dinilai baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pelaporan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan dalam waktu satu tahun sekali. Selain itu juga Badan Lingkungan Hidup telah melakukan transparansi kegiatan dan penggunaan anggaran dengan menggunggah ke website Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.
- ### B. Faktor Pendukung Kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
- Berikut ini merupakan faktor pendukung keberhasilan kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah :
1. Faktor personal, aspek yang menjadi pendukung kinerja Badan Lingkungan

Hidup Provinsi Jawa Tengah adalah kualitas dan komitmen sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dapat dinilai baik terlihat dari kemampuan sumber daya manusia melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian target program kerja. Sumber daya manusia di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah memiliki komitmen yang tinggi sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya bisa berjalan dengan optimal.

2. Faktor kepemimpinan, aspek yang menjadi pendukung kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah adalah motivasi, arahan dan bimbingan dari pemimpin serta pengambilan keputusan yang dilakukan pemimpin. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah memiliki pemimpin yang mampu memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada pegawainya di setiap kesempatan untuk mengoptimalkan kinerja. Dalam peran pengambilan keputusan, pemimpin dapat dikatakan demokratis karena menyertakan masukan dari pegawainya secara musyawarah.
3. Faktor tim, aspek yang menjadi pendukung kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah adalah dukungan antar pegawai, dan koordinasi. Pegawai di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah mengerti betul harus saling mendukung dalam mencapai tujuan karena hal ini merupakan kewajiban setiap individu. Koordinasi dilakukan dengan baik antar pegawai maupun dengan pemkab/kota dan SKPD terkait. Selain itu, fasilitas diberikan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah untuk menunjang kinerja pegawai.
4. Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang

diberikan kepada pegawainya. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah memiliki tata tertib yang tujuannya untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai dan mengoptimalkan kinerja. Fasilitas juga diberikan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah untuk menunjang kinerja pegawai. Perlengkapan dan peralatan diberikan seperti laptop atau computer di setiap bidang, kemudian adanya internet untuk menunjang pekerjaan dan sarana yang lainnya.

Adapun yang masih menjadi hambatan bagi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah adalah masih kurangnya sumber daya manusia berstatus pegawai negeri sipil di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, kurangnya pengaruh tekanan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.

## REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

1. Untuk lebih meningkatkan kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah perlu adanya upaya strategis dalam mengoptimalkan kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Tujuannya agar dapat melaksanakan program kegiatan secara optimal.
2. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan agar setiap

- langkah yang diambil tidak menyimpang dari peraturan yang ada.
3. Untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah perlu menerima pegawai honorer dengan menyesuaikan anggaran yang ada. Selain itu sumber daya manusia yang ada perlu diagendakan kegiatan seperti diklat untuk mengoptimalkan kemampuan pegawai tersebut.
  4. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah juga perlu memperhatikan perubahan dan tekanan lingkungan internal maupun eksternal sebagai penyemangat atau perbaikan kinerja dan dapat mengikuti perkembangan kebutuhan atau tuntutan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dharma, Surya. 2013. *Manajemen Kinerja Falsafah, Teori dan Penerapannya*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University : Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.
- Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen Edisi 2*. BPFE-Yogyakarta : Yogyakarta.
- Keban, Yermias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Isu dan Teori*. Gava Media : Yogyakarta.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- Tangkilisan, Hassel, Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Warsito, Yuwono Teguh. 2003. *Otonomi Daerah*. Semarang: Puskodak UNDIP.
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Darmawi, Edi. 2014. *Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Perspektif Good Governance (Studi Deskriptif mengenai Kinerja Aparatur Kelurahan Ditinjau dari Dimensi Akuntabilitas, Responsibilitas dan Responsivitas di Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma)*. Bengkulu : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik. Vol. 3, No 2.
- Roni dan Ria. 2013. *Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman*. Padang : Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol.29, No.1.
- Bakri. 2015. *Analisis Kinerja Pegawai Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur*. Kalimantan Timur : Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.3, No.2.
- Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota